

**REKOMENDASI**  
**FOCUS GROUP DISCUSSION FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TANGGAL 5 MEI 2023**

---

PIMPINAN FGD : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
WAKTU : JUM'AT/5 MEI 2023  
MATERI : PEMBAHASAN LANGKAH ANTISIPASI DAN KESIAPAN DAERAH  
DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DALAM SETIAP  
TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024.

---

**I. Pendahuluan**

Dalam rangka membahas langkah antisipasi dan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024 di Sumatera Barat, dipandang perlu melaksanakan FGD Forkopimda Provinsi Sumbar. FGD diadakan di Istana Gubernur pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023.

**II. Materi FGD**

langkah antisipasi dan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024 di Sumatera Barat

**III. Peserta Rapat**

- Gubernur Sumbar;
- Kapolda Sumbar;
- Danrem 032 Wirabraja;
- Danlantamal II Padang;
- Danlanud Sutan Sjahrir;
- Ka. Binda Sumbar;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
- Ka. Badan Kesbangpol Sumbar.

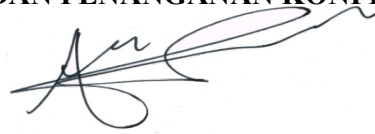
**IV. Rekomendasi**

- Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 tak hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja. Namun, dukungan dan soliditas dari seluruh pemangku kepentingan akan berkontribusi pada terciptanya sinergisitas yang kuat dan saling berkesinambungan.
- Salah satu indikator penting dalam mengukur kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah situasi yang tertib dan tenang dalam pelaksanaan pemilu serentak dan juga pilkada nantinya. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan perlu mengawal seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraannya dengan baik. Perlu dilakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu pelaksanaan perhelatan pesta demokrasi ini;

- Soliditas dan sinergisitas yang terbentuk diharapkan dapat menjadi katrol penyemangat seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam memelihara stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di daerah.
- Ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan Pemilu akan berdampak pada adanya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional. Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi yang tegas menjadi kunci untuk memastikan terlaksananya netralitas ASN dalam Pemilu.

Padang, 5 Mei 2023

**KABID KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGANAN KONFLIK**



**A.H.ARSLAND, S.Sos, M.Hum**